

Judul : Sekolah Wajib Wujudkan Rasa Aman, DPR: Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Tanggal : Jumat, 20 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sekolah Wajib Wujudkan Rasa Aman

DPR: Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Senayan mendesak lembaga pendidikan memberikan rasa aman bagi peserta didik. Generasi penerus bangsa ini harus dilindungi dari ancaman kekerasan seksual yang bisa merusak masa depan mereka.

WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, harus ada tindakan nyata mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan, di rumah, dan di tempat umum. Kasus ini harus menjadi perhatian semua pihak.

"Lembaga pendidikan adalah tempat tunas-tunas bangsa disemai agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, berkeadilan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan masa depan," tegas ujar wanita yang disapa Rerie ini.

Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, lanjutnya, mesti memastikan para pengelola lembaga pendidikan menjalankan proses sesuai kebijakan dan norma yang berlaku.

Pengawasan proses belajar mengajar harus dilakukan secara konsisten dan terukur. Agar, bila terjadi penyimpangan dalam proses pembelajaran dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan korban.

Rerie bilang, perlindungan dan rasa aman kepada semua anak merupakan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Juga ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Kementerian Agama (Kemendagri), lanjutnya, juga dapat memberikan peraturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan berlatar belakang agama. Peraturan tersebut harus disosialisasikan agar masyarakat memahami langkah-langkah menanggulangi kekerasan di lembaga pendidikan.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Iskandar mengatakan, "faktor relasi kuasa mempengaruhi kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah."

"LPSK mencatat lebih dari 25 persen korban kekerasan seksual yang meminta perlindungan terkait dengan dunia pendidikan," ujar Livia dalam keterangannya, kemarin.

Livia mengungkapkan, LPSK pernah menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru, tapi petugas atau pegawai hingga pemilik maupun pengurus yayasan.

"Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk mengejar dan mendapatkan pengetahuan, bukan sebaliknya," katanya.

Livia mencatat, berdasarkan laporan LPSK tahun 2022, permohonan perlindungan tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 634 permohonan.

Dari jumlah itu, 379 permohonan berstatus korban dan 84 di antaranya korban kekerasan seksual terkait dunia pendidikan.

"Hampir 25 persen permohonan adalah korban kekerasan seksual terkait dunia pendidikan. Artinya apa? Kekerasan seksual ada, kata dia.

Lebih rinci, jelas Livia, pesantren menjadi tempat kejadian terbanyak dengan 45 korban, tempat menginap 10 korban, dan tempat ibadah enam korban. Sedangkan pendidikan umum sebanyak 19 korban dan satu korban di universitas.

Kendati demikian, menurut Livia korban kekerasan seksual yang memohon perlindungan ke LPSK belum menggambarkan peristiwa sebenarnya. Pihaknya menyakini masih banyak korban lain, baik yang sudah melapor ke aparat penegak hukum tapi tidak mengajukan perlindungan ke LPSK.

Seperti diketahui, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan sebanyak 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah diproses hukum, sepanjang 2022.

Kasus terbanyak di satuan pendidikan yang berlatar belakang agama. Dari kasus tersebut, tercatat 117 korban anak-anak dengan rincian 16 anak laki-laki dan 101 anak perempuan, dengan pelaku berjumlah 19 orang. ■ TIF

Jemaah Haji Lansia Prioritaskan, Jangan Terlalu Lama Nunggu

SENAYAN meminta Pemerintah memprioritaskan keberangkatan ibadah haji bagi jemaah yang berumur di atas 65 tahun atau lanjut usia (lansia). Alasannya, daftar tunggu keberangkatan haji saat ini sangat panjang.

"Kasihani masyarakat yang berumur di atas 65 tahun. Bisa jadi sebelum waktu keberangkatannya tiba, mereka tidak dapat merasakan karena umurnya sudah terlalu tua," ujar anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

John mengingatkan Pemerintah, jangan sampai jemaah haji lansia terlalu lama menunggu antrean. Ibadah haji menjadi impian bagi setiap umat Muslim di seluruh dunia juga salah satu rukun Islam wajib bagi yang mampu. Sayangnya, untuk berangkat haji diperlukan penantian yang panjang.

Politikus Golkar ini menuturkan, sesuai prosedur, jemaah haji Indonesia masuk ke dalam daftar tunggu terlebih dahulu. Calon jemaah

ma (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, ada 62.879 calon jemaah haji lansia yang terdaftar hingga saat ini. Angka itu bagian dari kuota haji tahun ini sebanyak 221 ribu orang. Rinciannya, umur 65 tahun sampai 75 tahun itu ada sekitar 51.778.

Kemudian, yang berumur 76 tahun sampai 85 tahun sebanyak 8.760. Berumur 86 tahun sampai 95 tahun ada 2.074, dan yang di atas 95 tahun itu ada 269 calon jemaah.

"Jadi, ini kategori usia lanjut yang berjumlah 62.879 jemaah untuk sekarang," kata Yaqut di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Yaqut menjelaskan, dari jumlah jemaah haji lansia yang terdaftar, tidak semuanya akan diberangkatkan sekaligus. Sebab, ada beberapa variabel yang akan menjadi pertimbangan di tingkat Kementerian.

"Termasuk salah satunya jemaah haji Indonesia masuk ke dalam daftar tunggu terlebih dahulu. Calon jemaah

Lebih lanjut, Yaqut men-